



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**WEBINAR INTERNASIONAL
PENGARUSUTAMAAN DISKRIMINASI SEBAGAI BENTUK MALADMINISTRASI
DAN PERAN PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

23 September 2020

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENKO PMK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 35 TAHUN 2020

TUGAS

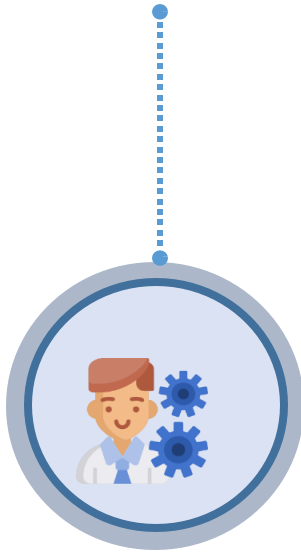
MENYELENGGARAKAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN URUSAN KEMENTERIAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

FUNGSI

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. **Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;**
- d. **Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet;**
- e. **Penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;**
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
- g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

TARGET PEMBANGUNAN 2021

Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) (nilai)
72,78 - 72,95



Tingkat Kemiskinan
(persen)
9,2-9,7

Pertumbuhan Ekonomi
(persen)
4,5 - 5,5



Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) (persen)
7,7-9,1

Gini Rasio
(indeks)
0,377 - 0,379



VISI DAN MISI PRESIDEN 2020-2024



VISI

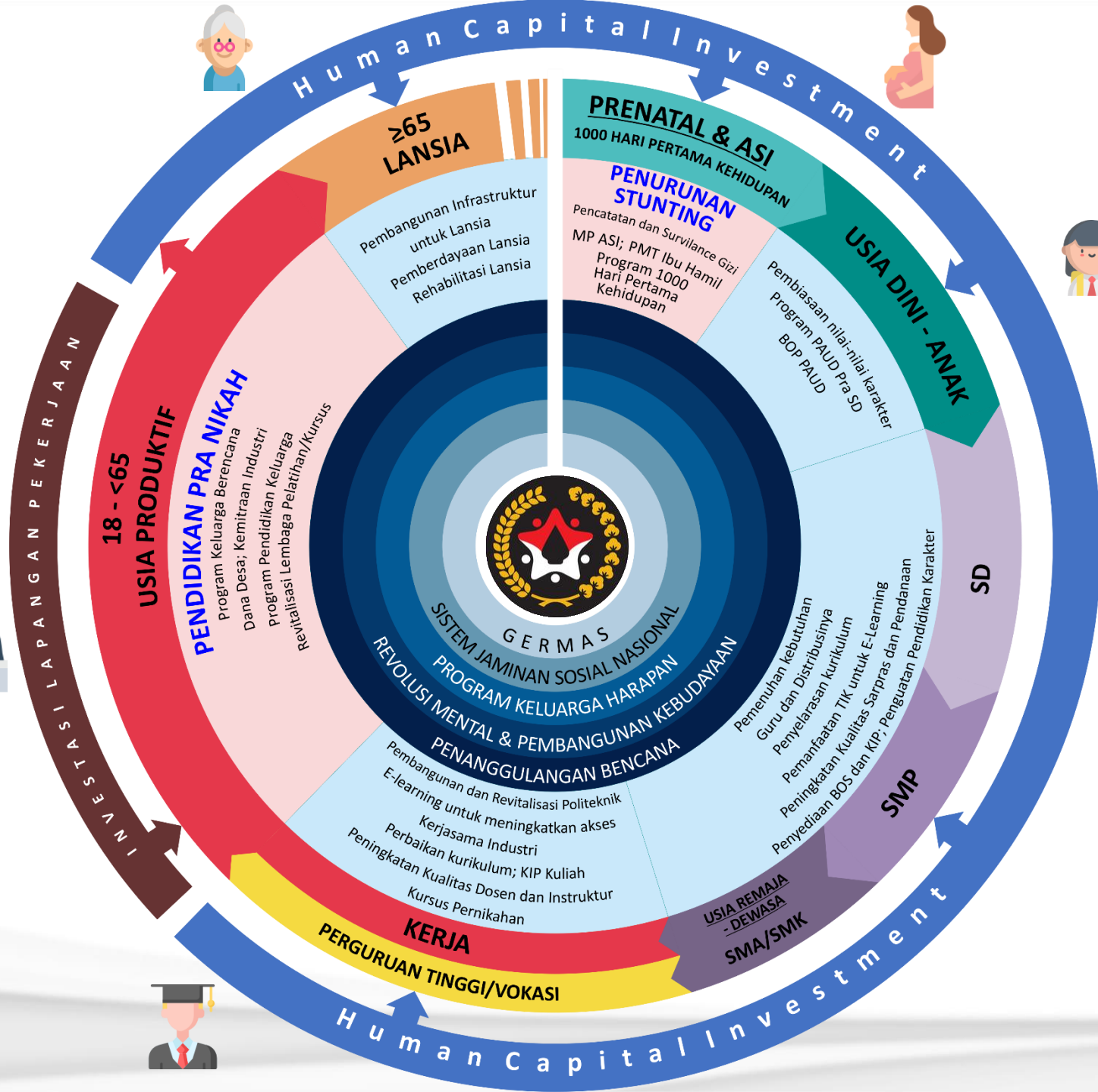
Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong

MISI

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.**
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.**
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;**
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kemenko PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk memastikan program-program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat dapat diakses oleh seluruh penerima manfaat tanpa diskriminasi

SIKLUS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024

MISI PRESIDEN

01

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia



02

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

03

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan



04

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

05

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa



06

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

07

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

08

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

09

Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

ARAHAN PRESIDEN

1

Pembangunan SDM

2

Pembangunan Infrastruktur

3

Penyederhanaan Regulasi

4

Penyederhanaan Birokrasi

5

Transformasi Ekonomi

7 AGENDA PEMBANGUNAN



Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan



SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

ARAH KEBIJAKAN BIDANG PMK TAHUN 2020



PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

- Meningkatkan Keterjangkauan Perlindungan Sosial
- Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan
- Meningkatkan Daya Tahan Ekonomi
- Memajukan Kebudayaan dan Penguatan Karakter untuk Mewujudkan Bangsa Berprestasi

ARAH KEBIJAKAN

- **Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**
 - Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dari tingkat dasar sampai kuliah
 - Peningkatan keahlian masyarakat miskin atau siswa setingkat SMA baru lulus sesuai kebutuhan Dunia Usaha
 - Percepatan pembangunan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan
 - Percepatan penurunan *Stunting*
- **Penguatan Program Perlindungan Sosial**
 - Pemberian Kartu Sembako
 - Lanjutan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Perbaikan mekanisme penyaluran yang terintegrasi dengan Bantuan Sosial

KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG MERATA DAN BERKEADILAN



KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN BANSOS

- Pengembangan digitalisasi dan integrasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bantuan, antara lain melalui Kartu Sembako Murah;
- Pengembangan variasi bantuan pangan, tidak hanya terbatas beras dan telur tetapi juga bahan pangan lokal, sayuran, daging, ikan, dan MPASI (bagi keluarga yang memiliki anak bawah dua tahun) untuk memenuhi cakupan nutrisi penerima bantuan; dan
- Peningkatan peran Pemda dalam pendampingan dan penyaluran bantuan.
- Perbaikan atau pemanfaatan data penerima bansos (DTKS) yang diupdate langsung berdasarkan laporan dari RT/RW secara berjenjang hingga ke pusat. Konsolidasi perbaikan data di tengah penyaluran bansos saat pandemi ini juga melibatkan KPK untuk memastikan transparansi pelaksanaannya



KEBIJAKAN PENDIDIKAN

- Percepatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan.
- Penguatan kebijakan afirmasi antara lain melalui BOS afirmasi bagi sekolah-sekolah yang berada di desa tertinggal dan sangat tertinggal serta perluasan alokasi TKG untuk Guru Garis Depan (GGD).
- Peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi guru antara lain melalui pemetaan yang komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan guru, tunjangan berbasis kinerja, dan program pelatihan.



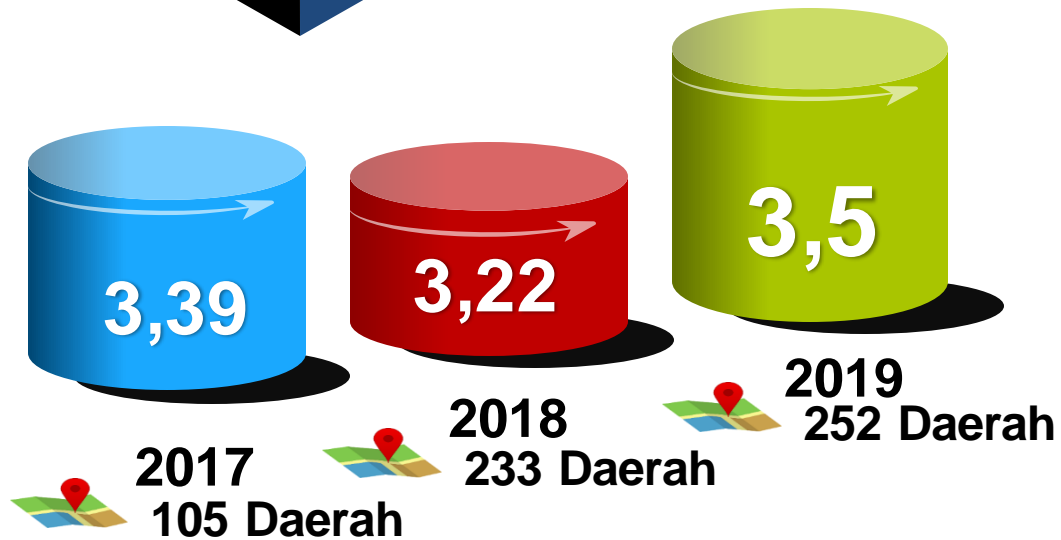
KEBIJAKAN KESEHATAN

- Refocusing anggaran kesehatan yang ditujukan untuk penguatan program promotif dan preventif antara lain melalui program GERMAS, dan efisiensi belanja kesehatan dengan pemanfaatan teknologi.
- Penguatan anggaran kesehatan untuk program *early childhood* yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita dan akselerasi penurunan stunting.
- Peningkatan level efektivitas program JKN dalam rangka mencapai *Universal Health Coverage* (menjamin pelayanan Kesehatan seluruh Penduduk Indonesia) melalui percepatan peningkatan kepesertaan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan *strategic purchasing* untuk efisiensi biaya manfaat.

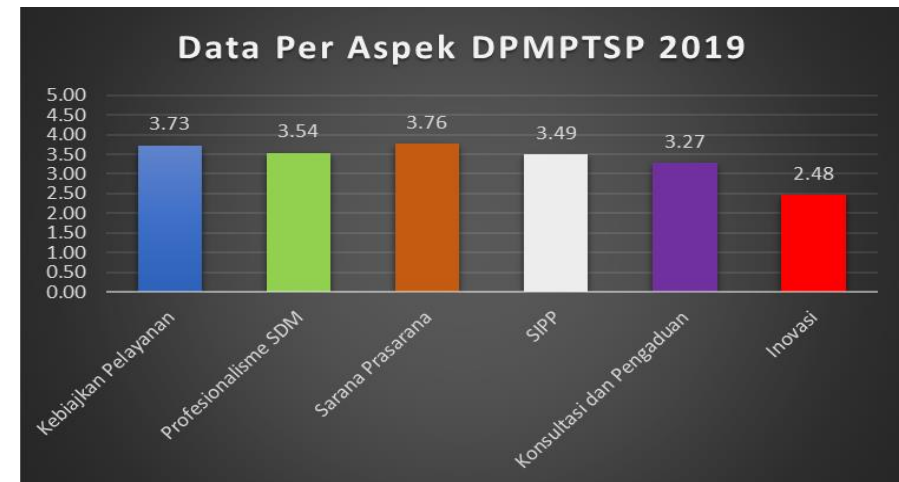
EVALUASI PELAYANAN PUBLIK



Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP Tahun 2017 - 2019



Hasil rata-rata indeks pelayanan publik pada 252 PTSP di Indonesia pada tahun 2019 yaitu 3,5 atau kategori **Baik dengan Catatan**



Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2019, Aspek inovasi mendapat nilai terendah. Inovasi perlu mendapat perhatian lebih. *One agency one innovation* adalah salah satu solusi.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI TANTANGAN PERBAIKAN

TRANSPARANSI SISTEM

PENERAPAN E-GOV

MANAJEMEN KINERJA

LEADERSHIP

REWARD & PUNISHMENT





TERIMA KASIH

kemenkopmk.go.id

 [kemenkopmkri](https://www.facebook.com/kemenkopmkri)

 [@kemenkopmk](https://twitter.com/@kemenkopmk)

 [@kemenko_pmk](https://www.instagram.com/@kemenko_pmk)

 [kemenkopmk](https://www.youtube.com/kemenkopmk)